

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN USAHA TANI DILIHAT DARI ASPEK PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA LUKBAYUR KECEMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

Sely Saleha*, Safrul Rijali
selysaleha01@gmail.com , safrulrijali@gmail.com

Program Studi Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung – Tabalong
Telp./Fax (0526) 2022484 Kode Pos 7012
Email : info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani pada aspek pengambilan keputusan di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dari pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuesioner dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Teknik analisa dalam penelitian ini dideskripsikan dengan cara menggunakan analisis persentase.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani pada aspek pengambilan keputusan Lukbayur kecamatan tanta kabupaten Tabalong masuk dalam kata kategori “kurang tinggi” hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi dengan hasil persentasi 36,89%.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengambilan Keputusan

COMMUNITY PARTICIPATION IN AGRICULTURAL ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT VIEWED FROM THE ASPECT OF DECISION-MAKING IN LUKBAYUR VILLAGE, TANTA SUB-DISTRICT, TABALONG REGENCY

ABSTRACT

Community participation in the administration of local government has an important function, among others, as a means for the community, whether individuals, community groups, or community organizations, to express their needs and interests so that the regional policy-making process is more responsive to the needs and interests of the community. Community participation is also crucial in realizing community concern and support for the success of development in their region. The purpose of this study is to identify and analyze community participation in the development of agricultural road infrastructure in the aspect of decision-making in Lukbayur Village, Tanta Sub-district, Tabalong Regency. The type of research used by the author in this study is descriptive with a quantitative approach based on data collection through observation, questionnaires, and documentation. The population and sample in this study consisted of 30 people. The analysis technique in this research is described using percentage analysis. The results of this study indicate that community participation in the development of agricultural road infrastructure in the decision-making aspect in Lukbayur Village, Tanta Sub-district, Tabalong Regency, falls into the “less high” category, as seen from the recapitulation with a percentage result of 36.89%.

Keywords: Community Participation, Decision Making

PENDAHULUAN

Keterlibatan masyarakat dibahas hampir di mana-mana Daerah, baik perkotaan maupun pedesaan di Indonesia karena dapat di lihat bahwa efek partisipasi begitu besar. Partisipasi masyarakat juga menentukan rencana atau Program yang ada di seluruh masyarakat, keberhasilan suatu Program ini juga secara intrinsik terkait dengan partisipasi masyarakat, sehingga memungkinkan berjalan dengan baik, keterlibatan sosial sangat dibutuhkan dalam suatu rencana atau program untuk suatu tindakan yang akan dilakukan dengan baik dan tentunya lancar. program yang mana Apa yang direncanakan pasti terkait dengan perkembangan saat ini lingkungan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Untuk Pembangunan dapat berjalan sesuai harapan, dengan baik Pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat perkembangan seperti itu. Partisipasi dalam komunitas itu sendiri juga penting kesadaran warga akan manfaat dan keuntungan Strategi yang digunakan adalah strategi kesadaran. (Adi, 2003)

“Penjelasan Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar penyuluhan desa dan pembangunan infrastruktur. dan dorongan ekonomi pembangunan daerah. penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang potensial dan efektif. “Bagian ketiga menjelaskan bahwa kekompakan, kekeluargaan dan gotong royong harus dikedepankan dalam pembangunan desa untuk menciptakan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam proses pengambilan keputusan didesa ada dua macam keputusan, Pertama keputusan – keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, Kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi penambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan

dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes) (Kushandajani, 2008)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dikatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Perencanaan pembangunan adalah pekerjaan pemerintah yang terencana dan sistematis untuk mengarahkan proses pembangunan, yang mempunyai tujuan pembangunan yang jelas yang memenuhi keinginan masyarakat, perencanaan pembangunan juga merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan. Perencanaan pembangunan digunakan untuk menilai potensi

masa depan, prospek pembangunan, hambatan dan risiko.

Biasanya masyarakat melaksanakan perencanaan pembangunan di desa dengan melaksanakan atau yang disebut dengan Musrembang Desa. Musrembang adalah focus perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga Publik yaitu Pemerintah Desa, bekerjasama dengan rakyat dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrembang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun diluar Desa. Adanya kebijakan pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), semakin menuntut setiap lembaga tersebut untuk berperan dalam berpartisipasi lebih luas, dengan cara hadir langsung pada Musrembang tersebut.

Dalam aspek partisipasi tenaga, masyarakat Desa Lukbayur memiliki partisipasi yang baik, Dimana masyarakat mampu bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan desa. untuk partisipasi keterampilan dalam pelaksanaan program pembangunan desa, masyarakat Desa Lukbayur sebagian besar memiliki keterampilan bertukang yang baik dapat dilihat dari keterampilan yang mereka berikan pada saat pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan untuk partisipasi barang dan uang, masyarakat Desa Lukbayur memiliki antusias yang baik pada setiap program pelaksanaan pembangunan desa, hal ini dapat dilihat dari sumbangan uang yang diberikan untuk pembangunan desa dan dukungan masyarakat Desa Lukbayur berupa barang juga mereka berikan untuk kelancaran program pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada satu aspek saja yaitu partisipasi yang ditinjau dari aspek dalam pembuatan keputusan. Berdasarkan temuan peneliti di Kantor Desa Luk Bayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong terdapat beberapa permasalahan terkait pembangunan jalan pertanian yaitu kurangnya ide masyarakat pada kegiatan rapat desa dimana kehadiran masyarakat dalam kegiatan rapat yang

di adakan di kantor desa yang menyebabkan tertundanya proyek infrastruktur jalan, sebagian masyarakat tidak berpartisipasi dalam keterlambatan atau dalam perencanaan konstruksi karena kurangnya partisipasi dari pemerintah itu sendiri dan sebagai akibat dari kurangnya partisipasi ini, pembangunan atau perencanaan jalan menjadi terlambat dan tidak berjalan dengan tuntas. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan rapat yang diadakan kantor desa berbenturan dengan pekerjaan masyarakat sekitar yang masing-masing sebagian besar penduduk Desa Lukbayur bermatapencaharian sebagai petani. Maka penelitian ini mendasari aspek dari Partisipasi dalam Pengambilan keputusan yang meliputi; (1) Keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan pembangunan desa; (2) Mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat; (3) Memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat pembangunan; (4) Keikutsertaan masyarakat dalam proses/perumusan pembuatan keputusan.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang mendukung bahwa partisipasi masyarakat dalam program pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani adalah (Adi, 2003) melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. serta hasil penelitian terdahulu yang partisipasinya kurang baik dalam program pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani adalah (Fadjar Judiono, 2019), (Latif, 2020) melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Jalan".

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Dilihat Dari Aspek Pengambilan Keputusan di Desa Luk Bayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dilihat dari aspek pengambilan

keputusan di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dilihat dari aspek pengambilan keputusan di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Partisipasi

Menurut (Astuti, 2011), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian "*a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*", artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi menurut (Astuti, 2011) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan

menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada "partisipasi" langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Menurut (Astuti, 2011) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.

- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang *incidental*
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara

Prinsip-Prinsip Partisipasi

Menurut (Sumampouw, 2004) adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) adalah:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan

dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia

Indikator Partisipasi Masyarakat

Dalam penelitian ini indikator partisipasi yang digunakan adalah teori dari (Dwiyanto, 2011) yang menyatakan bahwa partisipasi terdiri dari :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan

masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi

d. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan

Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan proses peningkatan dan pertumbuhan yang seimbang pada segala aspek kehidupan, baik aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek pemerintahan, aspek pertahanan keamanan maupun aspek ideologi. Proses tersebut dalam rangka pencapaian hakikat tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut (Achmad, 2019) memberikan definisi bahwa pembangunan adalah terjadinya suatu perubahan pada nilai-nilai ekonomi, sosial budaya dan politik. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan dilihat secara konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi atau kegiatan usaha tanpa akhir.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu proses perubahan sosial budaya. Supaya menjadi

suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya, jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka melainkan tergantung dari suatu kekuatan sendiri menuju emansipasi diri.

Terdapat 4 (empat) aspek penting dalam rangka perencanaan pembangunan (Todaro & Stephen C. Smith, 2006) :

- 1) Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai mekanisme proses politik dalam suatu negara untuk menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- 2) Meningkatkan kemampuan (artikulasi) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan dan sebaliknya.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang ditentukan dalam proses politik.
- 4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan sebagai suatu proses penyusunan rencana pembangunan sebaiknya menyertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. (Achmad, 2019) berpendapat bahwa makna perumusan bukanlah suatu makna yang akademis sifatnya akan tetapi adalah proses dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan pokok harapan, kebutuhan dan kepentingan dasarnya. Artinya adanya keterlibatan rakyat dalam proses perencanaan karena perencanaan bisa menjadi wahana untuk mengubah skema politik lama dari top down planning menjadi bottom up planning.

Tujuan utama pembangunan bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan dan pengurangan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Tiga tujuan inti pembangunan adalah:

- 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan,
- 2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan,
- 3) perluasan rentang pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa, yakni membebaskan mereka dari ketergantungan, tidak hanya terhadap orang ataupun negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. (Todaro & Stephen C. Smith, 2006)

Asas Pelayanan Publik

Menurut (Mahmudi, 2010) dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu :

- a. **Transparansi**
Pemberian pelayanan harus bersifat terbuka, mudah di akses oleh pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. **Akuntabilitas**
Pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Kondisional**
Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. **Partisipatif**
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. **Tidak Diskriminatif (Kesamaan Hak)**
Pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif dalam arti tidak

membedakan suku, ras, agama, golongan, status sosial dan ekonomi.

- f. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**
Pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

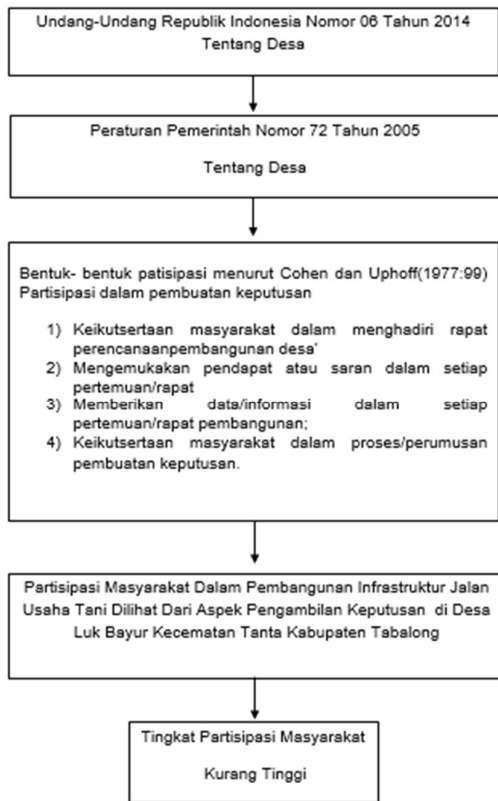
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Publik

Menurut (Moenir, 2008) faktor-faktor yang mendukung pelayanan, sebagai berikut:

1. **Faktor Kesadaran** yaitu kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam kegiatan pelayanan. Kesadaran para pegawai pada segala tingkatan terhadap tugas yang menjadi tanggungjawabnya dapat membawa dampak yang sangat positif terhadap organisasinya.
2. **Faktor Aturan** yaitu aturan dalam organisasi yang menjadi landasan kerja pelayanan. Aturan ini mutlak kebenarannya agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dan terarah, oleh karena itu harus dipahami oleh organisasi yang berkepentingan/bersangkutan.
3. **Faktor Organisasi** merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan dalam usaha pencapaian tujuan.
4. **Faktor Pendapatan** yaitu pendapatan pegawai yang berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan. Pendapatan yang cukup akan memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik.
5. **Faktor Keterampilan Tugas** yaitu kemampuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan pekerjaan. Ada tiga kemampuan yang harus dimiliki, yaitu kemampuan manajerial, kemampuan teknis dan kemampuan untuk membuat konsep.
6. **Faktor Sarana** yaitu sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan layanan. Sarana ini meliputi peralatan, perlengkapan, alat bantu dan fasilitas lain yang melengkapi seperti fasilitas komunikasi.

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Peneliti, 2023

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Menurut pendapat (Ali, 1998) untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klarifikasi dan membuat kesimpulan tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini mencoba menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dilihat dari aspek pengambilan keputusan di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, dan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan serangkaian kegiatan di lapangan mulai dari pengamatan lapangan, pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi

Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dilihat dari aspek pengambilan keputusan di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, maka data diambil dari perwakilan dari aparat desa yang berjumlah 9 orang dan masyarakat 21 orang

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100. Sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dengan jumlah 30 orang

Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian melalui angket terhadap informan yang berkompeten sesuai dengan keperluan data titik jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan.
2. Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan di Instansi, atau dari mana saja sudah diolah, merupakan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi, yaitu menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti secara sistematis serta akurat terhadap fenomena-fenomena yang ada sesuai dengan pokok pembahasan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan dan

menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dilihat dari aspek pengambilan keputusan di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

- 2) Angket, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah disediakan pilihan jawabanya dan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dilihat dari aspek pengambilan keputusan di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong
- 3) Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintahan, hasil penelitian, foto atau gambar, buku, rekaman, laporan, keuangan, undang-undang, hasil karya dan lain sebagainya

Analisis Data

Setelah mendapat data yang Menurut (Ali, 1998) menyatakan bahwa analisis deskriptif kuantitatif yaitu menggunakan proses berpikir induktif, untuk menjadi hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara masalah yang diteliti. Induktif dalam hal ini dibuat bertolak dari berbagai fakta terindeksasi munculnya maupun tidak.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh analisis data, maka penulis tidak menggunakan teknik statistik dalam arti tidak terikat kepada skor dan skala. Tetapi hanya menggunakan teknik analisis statistik sederhana dengan menggunakan presentase (%) dan kemudian data yang diperoleh dari responden dianalisis atau diolah deskriptif kuantitatif. Data yang ditulis oleh penulis dari hasil akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabulasi distribusi frekuensi. Tabulasi adalah proses penempatan atau meletakkan data dalam bentuk tabel atau grafik tertentu dengan cara membuat tabel yang berisikan data yang sesuai dengan kebutuhan analisis, tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis, sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori.

Persentase data digunakan untuk melihat perbandingan besar kecilnya frekuensi jawaban dalam angket yang dihitung dalam jumlah persentase, karena jumlah jawaban pada setiap angket berbeda. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Ali (1998:184), bahwa rumus untuk menghitung persentase adalah.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi Data

N = Jumlah Responden

Mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian kemudian di masukkan dalam tabel yang sudah disiapkan

Dengan Range Tabulasi :

80%	- 100%= Sangat Baik
60%	- 79%= Baik
40%	- 59%= Cukup Baik
20%	- 39%= Tidak Baik
0%	- 19%= Sangat Tidak Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Dilihat Dari Aspek Pengambilan Keputusan Di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

1. Kehadiran

Kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rapat yang diselenggarakan di Kantor Desa merupakan indikator penting dalam menilai tingkat partisipasi warga. Berdasarkan tanggapan responden, mayoritas masyarakat sering hadir dalam kegiatan rapat. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang baik terhadap pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa, terutama yang menyangkut pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Partisipasi yang tinggi ini juga mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dari warga untuk terlibat dalam proses-proses yang berlangsung di tingkat desa, yang menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik dan inklusif.

Namun, meskipun kehadiran masyarakat dalam rapat cukup tinggi, tingkat keterlibatan mereka dalam diskusi dan pengambilan keputusan selama rapat masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan. Sebagian besar masyarakat lebih sering hadir sebagai peserta pasif, yang hanya mendengarkan tanpa banyak memberikan kontribusi dalam bentuk saran, pendapat, atau pertanyaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang isu-isu yang dibahas, ketidaknyamanan untuk berbicara di depan umum, atau minimnya dorongan dari pihak penyelenggara rapat untuk melibatkan semua peserta secara aktif.

Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam menyelenggarakan rapat-rapat desa. Pemerintah desa dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi metode-metode yang lebih partisipatif dalam rapat, seperti diskusi kelompok kecil, penggunaan alat bantu visual, atau pelatihan fasilitator untuk memastikan semua suara dapat terdengar. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan tentang isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan kompeten untuk terlibat dalam diskusi.

Lebih lanjut, penting bagi desa untuk mengevaluasi efektivitas rapat-rapat yang telah dilaksanakan dan mencari umpan balik dari masyarakat tentang bagaimana cara meningkatkan keterlibatan mereka. Ini bisa dilakukan melalui survei atau wawancara mendalam dengan peserta rapat untuk memahami hambatan-hambatan yang mereka hadapi serta mendapatkan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, pemerintah desa dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

Partisipasi yang tinggi tidak hanya dilihat dari kehadiran, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif ini

penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam rapat desa harus menjadi prioritas dalam upaya memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan inklusif.

Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat desa akan semakin meningkat, tidak hanya dalam hal jumlah kehadiran, tetapi juga dalam kualitas kontribusi yang mereka berikan. Partisipasi yang lebih bermakna ini akan berdampak positif pada pembangunan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan warganya, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil yang dicapai.

2. Memberikan Saran Atau Pendapat

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat yang diselenggarakan di Kantor Desa dapat dilihat dari beberapa indikator penting, salah satunya adalah kehadiran dan keterlibatan mereka dalam memberikan pendapat, masukan, serta usulan terkait perencanaan pembangunan. Berdasarkan tanggapan responden, terlihat bahwa masyarakat cenderung sering hadir dalam rapat, meskipun tingkat keterlibatan aktif mereka dalam berbagai aspek perencanaan pembangunan masih bervariasi.

Dalam hal partisipasi masyarakat terkait pemberian pendapat dalam usulan perencanaan pembangunan, hanya sekitar sepertiga responden yang secara konsisten menyatakan bahwa mereka sering terlibat aktif. Partisipasi ini, dengan persentase 33,3%, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk terlibat, sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses ini. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi dalam pemberian pendapat masih tergolong "Kurang Tinggi". Rendahnya keterlibatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang proses perencanaan pembangunan atau mungkin juga

karena rasa apatis terhadap hasil dari rapat tersebut.

Di sisi lain, ketika menilai partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan untuk memilah keputusan pembangunan yang akan dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan partisipasi dengan 56,6% responden yang menyatakan sering terlibat. Tingkat keterlibatan yang lebih tinggi ini mencerminkan bahwa masyarakat lebih merasa memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap keputusan yang langsung berdampak pada pembangunan desa mereka. Meskipun demikian, meskipun persentase partisipasi ini sudah lebih baik, masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut agar masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memahami sepenuhnya implikasi dari keputusan yang diambil.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat terkait tindakan perencanaan pembangunan yang telah disetujui menunjukkan pola yang mirip dengan tingkat partisipasi dalam usulan awal perencanaan. Dengan persentase 40% responden yang sering terlibat, partisipasi ini juga dapat dikategorikan sebagai "Kurang Tinggi". Ini menandakan bahwa meskipun masyarakat hadir dalam rapat, tidak semua dari mereka aktif berpartisipasi dalam proses yang sangat penting ini. Rendahnya partisipasi pada tahap ini bisa disebabkan oleh kurangnya follow-up dari pihak desa untuk memastikan bahwa setiap suara masyarakat didengar dan diimplementasikan dalam tindakan nyata.

Dari data yang ada, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat desa, khususnya dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, masih belum optimal. Kehadiran fisik masyarakat dalam rapat tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keterlibatan aktif mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat, tidak hanya dalam kehadiran, tetapi juga dalam memberikan ruang yang cukup bagi mereka

untuk menyampaikan pendapat, usulan, dan masukan yang konstruktif.

Pemerintah desa perlu mempertimbangkan strategi-strategi baru untuk mendorong partisipasi yang lebih tinggi, seperti melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan desa, serta memberikan pelatihan atau bimbingan kepada masyarakat agar mereka lebih siap dan percaya diri dalam berpartisipasi. Selain itu, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan terbuka selama rapat berlangsung, di mana setiap pendapat dihargai dan dipertimbangkan, juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Dengan meningkatkan kualitas partisipasi ini, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Partisipasi masyarakat yang tinggi dan bermakna akan membantu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berakar pada kepentingan warga, sehingga hasilnya pun lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Memberikan Data Atau Informasi

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat yang dilaksanakan di Kantor Desa menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kehadiran. Dari sejumlah responden yang terlibat, terdapat kelompok masyarakat yang menyatakan diri mereka sangat sering hadir dalam kegiatan rapat tersebut. Selain itu, terdapat pula kelompok yang sering hadir, diikuti oleh mereka yang cukup sering hadir, dan sekelompok kecil yang jarang atau bahkan tidak pernah hadir sama sekali.

Dengan mayoritas responden yang menyatakan sering hadir, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa menunjukkan tren yang positif. Kehadiran yang konsisten ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari.

Tingginya partisipasi masyarakat ini menjadi indikator penting bahwa proses pembangunan di desa dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, partisipasi yang signifikan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap arah dan kebijakan pembangunan di desa mereka. Dengan seringnya kehadiran dalam rapat, masyarakat berkesempatan untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan yang lebih tepat sasaran. Mereka juga memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan usulan, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak desa.

Tidak hanya dalam usulan perencanaan, masyarakat juga terlibat aktif dalam tahap-tahap berikutnya, seperti tindakan rencana program pembangunan yang disetujui. Keterlibatan ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak hanya berdasarkan kebijakan dari atas, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Partisipasi ini memberikan kepercayaan diri kepada masyarakat bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam pembangunan desa.

Selain itu, tingkat kehadiran yang sering dalam rapat-rapat tersebut juga mengindikasikan adanya rasa memiliki yang kuat terhadap desa. Masyarakat merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari desa dan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini menjadi landasan bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua pihak merasa dilibatkan dan hasil dari pembangunan tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka.

Kesimpulannya, partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dikategorikan sebagai cukup tinggi. Kehadiran mereka yang konsisten dalam kegiatan rapat dan keterlibatan aktif dalam memberikan data serta masukan mencerminkan adanya kemauan

untuk bersama-sama membangun desa yang lebih baik. Tingkat partisipasi ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan proses demokrasi di tingkat desa, tetapi juga menjadi modal utama bagi terciptanya program-program pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Lebih jauh lagi, tingginya tingkat partisipasi ini juga bisa dilihat sebagai cerminan dari adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Mereka merasa bahwa apa yang mereka sampaikan dalam rapat-rapat tersebut akan ditindaklanjuti dan bahwa pendapat mereka memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Kepercayaan ini penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan, karena merupakan fondasi bagi kerja sama yang lebih erat antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan di masa depan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang terlihat dalam rapat-rapat di Kantor Desa bukan hanya sekedar kehadiran fisik, tetapi merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun desa yang lebih baik dan sejahtera. Partisipasi ini, ketika dikelola dengan baik, akan menjadi kunci sukses bagi berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya, akan membawa dampak positif yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

4. Keterlibatan Dalam Proses Pembuatan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat di Kantor Desa menunjukkan variasi dalam tingkat kehadiran dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan data yang terkumpul, terlihat bahwa ada sejumlah responden yang menyatakan sangat sering hadir dalam rapat, sementara kelompok lain menyatakan sering atau cukup sering hadir, dan hanya sedikit yang jarang hadir.

Dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, mayoritas responden menyatakan sering terlibat.

Sebanyak 40% dari responden menyatakan bahwa mereka sering hadir dalam rapat yang membahas pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa ada partisipasi yang cukup aktif dari masyarakat. Namun, dengan perolehan persentase ini, partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan tetap dapat dikategorikan sebagai "Kurang Tinggi." Hal ini mungkin menunjukkan bahwa meskipun ada keterlibatan, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam mendorong partisipasi yang lebih konsisten dan luas.

Lebih lanjut, ketika dilihat dari sudut pandang keterlibatan dalam perumusan keputusan yang disetujui, tingkat partisipasi yang sangat sering mencapai 40%, diikuti oleh partisipasi yang sering dengan persentase 33,3%. Meskipun tingkat keterlibatan ini relatif baik, tetap saja dapat dikategorikan sebagai "Kurang Tinggi." Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kelompok masyarakat yang sangat aktif terlibat, sebagian besar responden masih berada dalam kategori yang lebih rendah dalam hal kehadiran dan keterlibatan aktif.

Kategorisasi "Kurang Tinggi" ini dapat mencerminkan beberapa tantangan dalam memobilisasi partisipasi masyarakat. Meskipun ada individu yang secara konsisten hadir dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan, sebagian besar masyarakat mungkin masih kurang termotivasi atau merasa kurang berdaya dalam mempengaruhi hasil keputusan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi, keterbatasan waktu, atau persepsi bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan yang signifikan.

Untuk meningkatkan partisipasi, perlu ada upaya yang lebih besar dari pihak pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan benar-benar inklusif dan transparan. Ini bisa melibatkan peningkatan akses informasi, penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam partisipasi masyarakat, tidak hanya dalam hal kehadiran fisik, tetapi juga dalam kualitas keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kesejahteraan desa.

Kesimpulannya, meskipun ada partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan perumusan keputusan di Kantor Desa, tingkat keterlibatan ini masih berada dalam kategori "Kurang Tinggi." Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan mendalam, agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan desa mereka. Partisipasi yang lebih tinggi dan berkualitas akan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan seluruh masyarakat dan akan membawa dampak yang positif bagi kemajuan desa.

Untuk mencari Presentase rata-rata menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Masing-masing pilihan alternatif mempunyai bobot sebagai berikut:

Pilihan A dengan bobot 5

Pilihan B dengan bobot 4

Pilihan C dengan bobot 3

Pilihan D dengan bobot 2

Pilihan E dengan bobot 1

Dari bobot yang telah diberikan maka diperoleh F sebagai berikut:

$$F(A) = 62 \times 5 = 310$$

$$F(B) = 133 \times 4 = 532$$

$$F(C) = 58 \times 3 = 174$$

$$F(D) = 41 \times 2 = 82$$

$$F(E) = 5 \times 1 = 5$$

$$F = 1.103$$

Dari rekapitulasi tersebut dapat diketahui jumlah dari jawaban responden sebagai berikut:

$$A = 62$$

$$B = 133$$

$$C = 58$$

$$D = 41$$

$$E = 5$$

Rekapitulasi dapat diketahui sebagai berikut:

$$\begin{aligned} N &= F(A) + F(B) + F(C) + F(D) + F(E) \\ &= 62 + 133 + 58 + 41 + 5 \\ &= 299 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari angka yang telah diperoleh maka dapat dicari presentase rata-rata sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P &= \frac{F}{N} \times 100 \% \\ P &= \frac{1,103 \cdot 100}{10 \cdot 299} \\ &= \frac{110,300}{2990} \\ &= 36,89 \end{aligned}$$

Dari Presentase rata-rata yang diperoleh diatas adalah presentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani pada aspek pengambilan keputusan di desa lukbayur kecamatan tanta. maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi pengambilan keputusan berdasarkan evaluasi jumlah rata-rata responden dengan presentase 36,89% termasuk dalam kategori "Kurang Tinggi".

PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 Agustus 2023, ditemukan adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat di Desa Lukbayur, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Penurunan ini khususnya terlihat dari aspek pengambilan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Setelah peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Lukbayur adalah sebagai berikut:

Pengambilan Keputusan Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah penelitian dan implementasi program pembangunan. Rapat yang diadakan memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu, kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat krusial. Meskipun rapat tersebut bersifat dari masyarakat dan untuk masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kehadiran

masyarakat dalam rapat yang membahas perencanaan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan usaha tani.

Tahap Keikutsertaan Masyarakat Dalam tahap ini, keikutsertaan masyarakat diharapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Pada rapat yang membahas perencanaan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, kehadiran masyarakat seharusnya menjadi momentum penting untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan mereka. Namun, kenyataannya, banyak masyarakat lebih memilih untuk menggarap lahan pertanian mereka daripada menghadiri rapat tersebut. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

Tahap Mengemukakan Pendapat atau Saran Setelah keikutsertaan, masyarakat juga diharapkan aktif dalam mengemukakan pendapat atau saran selama rapat. Keterlibatan ini penting agar setiap rencana pembangunan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam rapat di Desa Lukbayur, partisipasi masyarakat dalam memberikan saran atau pendapat terpantau cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Misalnya, masyarakat mengemukakan saran mengenai lokasi pembangunan jalan usaha tani yang dianggap lebih prioritas, namun tidak semua masukan tersebut terakomodasi dengan baik.

Tahap Memberikan Data atau Informasi Tahap ini adalah momen di mana masyarakat dapat memberikan data atau informasi yang relevan untuk menunjang keakuratan keputusan yang diambil. Misalnya, masyarakat dapat memberikan informasi tentang kondisi terkini jalan usaha tani yang membutuhkan perbaikan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang enggan atau tidak cukup peduli untuk memberikan informasi yang akurat, sehingga keputusan yang diambil terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Tahap Keterlibatan dalam Proses Pembuatan Keputusan Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan adalah tahap akhir yang menentukan hasil akhir dari rapat yang diadakan. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga berperan dalam keputusan yang diputuskan oleh kepala desa. Sayangnya, di Desa Lukbayur, meskipun pihak pemerintah desa telah menyediakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat, tingkat partisipasi yang rendah masih menjadi kendala. Surat undangan telah disampaikan ke setiap rumah, namun rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan banyaknya saran yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil rapat yang didasarkan pada masukan, saran, serta data atau informasi yang diberikan oleh masyarakat akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan di desa tersebut. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Fadjar Judiono, 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat kurang optimal dalam program pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Latif, 2020) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik dalam konteks yang mereka teliti.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, program pembangunan yang direncanakan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Lukbayur

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab terdahulu dapat dikemukakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor desa Lukayur

kecamatan tanta kabupaten Tabalong mengenai pengambilan keputusan perencanaan pembangunan bahwa partisipasi di desa Lukbayur adalah “Kurang Tinggi”

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dilihat dari aspek pengambilan keputusan dengan indikator kehadiran masyarakat.

1. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan rapat yang diadakan di kantor desa sehingga usulan-usulan atau perencanaan pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik masyarakat juga diharapkan selalu terdorong untuk mengikuti kegiatan atau perencanaan yang dilaksanakan di kantor desa

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. (2019). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Adi, I. R. (2003). *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ali, M. (1998). *Penelitian Prosedur dan Strategis*. Bandung: Angkasa.
- Astuti, D. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar Judiono, T. H. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 54-62.

- Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif socio-legal*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Latif, A. M. (2020). Jurnal Ilmiah Pemerintahan. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani*, 4(1), 78-81.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Moenir. (2008). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumampouw, M. (2004). *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Todaro, M. P., & Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.